



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA**

Jalan Menteri Supeno No. 10, Manahan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah 57139

---



**BUKU I  
RINGKASAN EKSEKUTIF**

**DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN  
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH**



# WALIKOTA SURAKARTA

## PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 11 tentang tahun 2020 tentang cipta kerja dan undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. DIKPLHD ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas dan benar mengenai data dan informasi isu prioritas lingkungan Kota Surakarta serta pengelolaannya. Saya menyatakan bahwa DIKPLHD Kota Surakarta Tahun 2021 memuat isu prioritas daerah yang didasarkan pada proses partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di Kota Surakarta yang meliputi unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Perguruan Tinggi dan Lembaga Masyarakat. Isu – isu lingkungan hidup di Kota Surakarta Tahun 2021 berdasarkan prioritasnya meliputi: (1) sampah dan limbah B3 (2) kualitas air (3) Tata guna lahan (4) kemacetan lalu lintas. Demikian Surat Pernyataan Perumusan Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Juli 2021

WALIKOTA SURAKARTA



**GIBRAN RAKABUMING RAKA**



# WALIKOTA SURAKARTA

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2021 dapat diselesaikan dengan baik. Tujuan dari penulisan DIKPLHD ini adalah untuk memberikan gambaran dan uraian secara jelas mengenai data dan informasi berdasarkan isu prioritas lingkungan dan inisiatif yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan, perbaikan kualitas sumber daya alam dan perbaikan tata kelola lingkungan. Apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh Tim IKPLHD dan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang telah mendukung penyusunan DIKPLHD Kota Surakarta Tahun 2021. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna penyempurnaan Dokumen ini. Semoga Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 ini bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.



Surakarta, Juli 2021

WALIKOTA SURAKARTA

**GIBRAN RAKABUMING RAKA**



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Menteri Supeno No. 10 Telp. / Fax. (0271) 714898 E-mail :  
dlh@surakarta.go.id

**SURAKARTA**

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : Ir. Gatot Sutanto, M.Si  
NIP : 19650327 199203 1 006  
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Dengan ini menyatakan komitmen untuk menjalankan surat sekretaris jendral Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor: S.408/SETJEND/DATIN/ DTN.O/11/2021 tanggal 25 Februari 2021 hal penyampaian Pedoman DIKPLHD 2021, sebagai salah satu bentuk pelaksanaan amanat undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan pelaksanaannya.

Akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya pembuatan dokumen sesuai dengan Pedoman penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) 2021

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Surakarta

Pada tanggal : Juli 2021

Mengetahui,

WALIKOTA SURAKARTA

Yang menyatakan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KOTA SURAKARTA



**GIBRAN RAKABUMING RAKA**



**Ir. GATOT SUTANTO, M.Si**

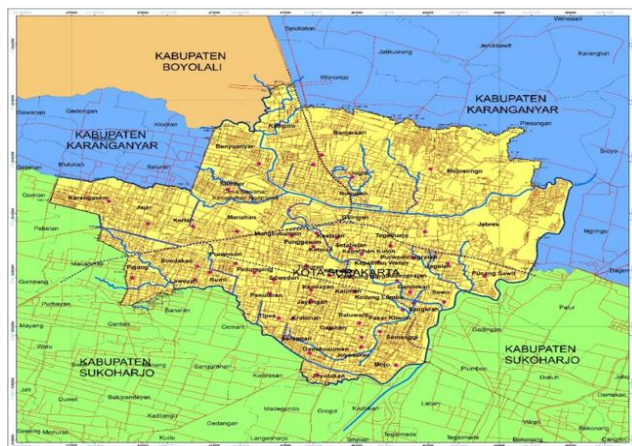
## DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERUMUSAN ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
PAKTA INTEGRITAS .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
1 PENDAHULUAN .....	1
2 ANALISIS DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE (DPSIR) ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA .....	4
3 ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP .....	14
4 INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH .....	14
5 PENUTUP .....	15

# Ringkasan Eksekutif

## INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

### 1. PENDAHULUAN



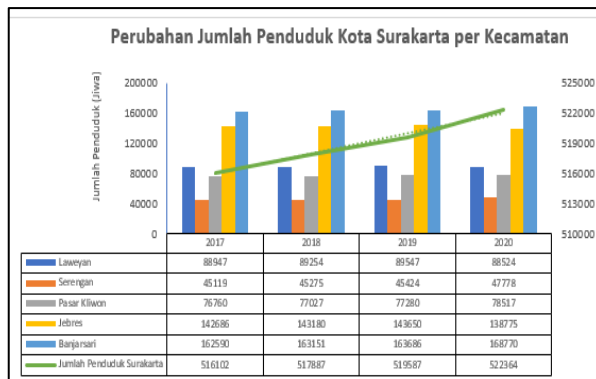
Kota Surakarta atau juga disebut "Kota Solo" secara astronomis terletak pada  $110^{\circ}45'15''$  -  $110^{\circ}45'35''$  bujur timur dan antara  $7^{\circ}36'$  -  $7^{\circ}56'$  lintang selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa

Tengah memiliki luas wilayah keseluruhan sebesar  $46.72 \text{ Km}^2 (\pm 0,13\%)$  luas wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Posisi strategis Kota Surakarta menjadikan kota ini sebagai Pusat Kegiatan Nasional dan kawasan andalan Provinsi Jawa Tengah yaitu wilayah ekonomi Segitiga Joglosemar (Kota Yogyakarta – Kota Solo – Kota Semarang). Selain itu juga menjadi pusat pertumbuhan perekonomian, di wilayah Eks-Karesiden Surakarta, yang meliputi Kab. Boyolali, Kab. Sukoharjo, Kab. Wonogiri, Kab. Sragen dan Kab. Klaten atau dikenal dengan sebutan ***Subosukowonosraten***. Semakin meningkat aktivitas ekonomi kabupaten-kabupaten tersebut makin meningkat pula beban Kota Surakarta sebagai lalu lintas perdagangan.

Dengan penyebaran Covid-19 di seluruh Indonesia, Kota Surakarta kini memiliki dua tantangan besar yang harus diselesaikan. Pertama, menjaga kesehatan masyarakat dari Covid-19 dan beradaptasi dengan kehidupan baru (*New Normal*). Kedua, keberlangsungan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern. Tantangan di bidang ekonomi, sebelum Pandemi Covid-19 perekonomian daerah tumbuh dikisaran 5,6 % dan

setelah adanya pandemi mengalami penurunan akibat terhentinya beberapa kegiatan produktif di berbagai sektor.



Jumlah penduduk Kota Surakarta selalu mengalami trend peningkatan. Pada Tahun 2020 berdasarkan data BPS berjumlah 522.364 jiwa, dengan luas wilayah yang relatif kecil, menjadi kota

dengan kepadatan penduduk yang tinggi sebesar 11.180 jiwa/km<sup>2</sup>.

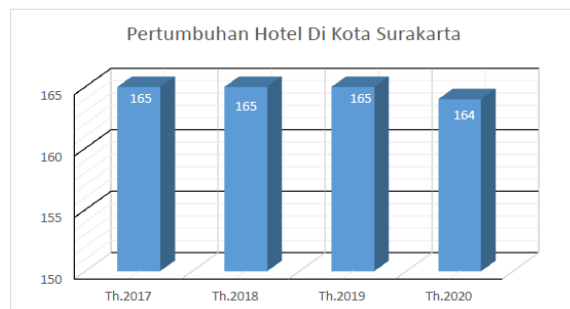
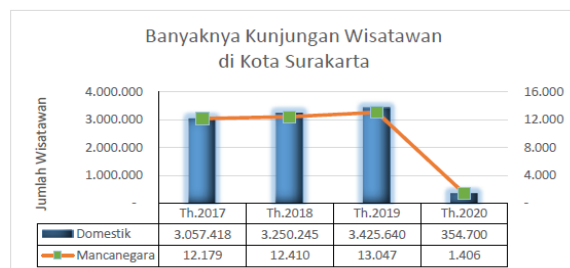
Kondisi fisik dan geografis Kota Surakarta memiliki topografi relatif datar dengan 80,3% dengan kemiringan 0-2%, sedangkan sisanya (19,7%) merupakan lahan bergelombang dengan gradien kemiringan 2-15% (Bapedda, 2021). Kota Surakarta beriklim tropis dan bertemperatur sedang dengan suhu udara berkisar antara 25 °C - 28 °C. Sedangkan kelembaban udara berkisar antara 71,0 % – 88,0 %.



Pada Tahun 2019 Kota Surakarta mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 8,04 % dibanding Tahun 2018. Tetapi di Tahun 2020 mengalami penurunan 0,81% disebabkan oleh wabah

Pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan diseluruh lapangan usaha yang tidak dipengaruhi oleh inflasi. Sektor konstruksi memberikan sumbangan tertinggi sebesar 27,04 % (menurun dari sebelumnya 27,11 % di Tahun 2019).

Pertumbuhan yang cukup tinggi terjadi pada sektor informasi dan komunikasi sebesar 14,54% (dibanding Tahun 2019 sebesar 12,01%). Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi informasi di Kota Surakarta sangat pesat ditambah peningkatan peranan disaat Pandemi Covid-19 melanda. Peningkatan PDRB di Kota Surakarta secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap selain terpenuhinya kebutuhan primer, juga terhadap kebutuhan sekunder ataupun tersier. Efek peningkatan kebutuhan sekunder/tersier masyarakat sebagai contoh adalah meningkatnya jasa kesehatan, meningkatnya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor, meningkatnya kebutuhan akan gaya hidup (*life style*), meningkatnya kebutuhan hiburan (*entertainment*), hotel, wisata dan wisata kuliner. Hal tersebut dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan terhadap lingkungan pada sisi kebutuhan terhadap alih fungsi lahan, masalah kemacetan, dan meningkatnya timbulan sampah.



Aktivitas perekonomian yang dominan di Kota Surakarta adalah perdagangan, jasa dan pariwisata yang diselaraskan dengan cita-cita Surakarta menjadi Kota MICE (*Meeting, Incentives, Convention and Exhibition*) dan kota budaya. Hal tersebut memicu peningkatan : pembangunan infrastruktur, investasi, pendatang dan pengunjung. Kondisi ini tentunya akan berdampak negatif bagi Kota Surakarta, yaitu tekanan lingkungan yang diterima akan semakin besar.

Untuk membantu perumusan kebijakan terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kota Surakarta, diperlukan suatu sarana penyediaan data dan informasi mengenai



pengelolaan lingkungan hidup yaitu dengan disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surakarta Tahun 2021. Proses penyusunan Dokumen IKPLHD dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun, pembagian tugas, penentuan isu prioritas dengan melibatkan masyarakat melalui FGD, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data dengan pendekatan *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR).

## **2. ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT DAN RESPONSE* (DPSIR) ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA SURAKARTA**

Adapun analisis *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR) untuk masing – masing isu prioritas adalah sebagai berikut:

### **A. Tata Guna Lahan**

- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Strategi dan kebijakan pengembangan struktur ruang yaitu perkembangan Kota Surakarta sebagai Pusat Kegiatan Nasional, kawasan CBD (*Central Business District*) andalan Joglosemar dan Subosukowonosraten, Kota MICE dan Kota Budaya.
- **Tekanan (*Pressure*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan yaitu: 1). Semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan kurangnya kesadaran terhadap hukum tata guna lahan. 2). Strategi dan kebijakan pengembangan struktur ruang yang berdampak pada peningkatan investasi dan pembangunan. 3).Revitalisasi Cagar Budaya di Kota Surakarta
- **Kondisi (*State*)**. 1). Terdapat adanya kawasan bernilai sejarah tinggi (Bangunan Cagar Budaya) yang harus dilindungi, 2). Penurunan luas lahan pertanian, tanah kosong, dan lahan kering, 3). Penggunaan dan

penurunan luas lahan pertanian, tanah kosong, dan lahan kering, 4). Luas RTH Kota Surakarta tidak mengalami perubahan signifikan.

- **Dampak (*Impact*)** terhadap masalah perubahan alih fungsi tata guna lahan yaitu: 1). Menurunnya luas lahan pertanian sehingga menyebabkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian lokal. 2). Mengancam keberadaan Bangunan Cagar Budaya. 3). Masih adanya kawasan kumuh.
- **Respon (*Response*):** 1). Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni dan mengurangi kawasan pemukiman kumuh melalui Keputusan Walikota Surakarta No. 413.21/38.3/1/2016, 2). Penentuan zonasi kawasan Kota Surakarta melalui Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Surakarta. Penataan dilakukan agar sesuai dengan peruntukan seperti: penataan pemukiman bantaran sungai dan ruang milik jalan; penataan jalur pedestrian; penataan taman kota; penataan pasar tradisional; Peningkatan RTH dengan penghijauan dan pembangunan RTH.

## **B. Kualitas Air**

- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah penurunan kualitas air di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Adanya program MICE Kota Surakarta meningkatkan investor di Kota Surakarta. 3). Lokasi dan posisi Kota Surakarta yang sangat dipengaruhi oleh daerah sekitarnya.
- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Adanya peningkatan penduduk dan permukiman menyebabkan peningkatan volume air limbah domestik. 2). Peningkatan pembangunan sarana-prasarana penunjang perekonomian menyebabkan timbulan air limbah yang semakin besar. 3). Kesulitan ketersediaan lahan dalam pembangunan IPAL komunal, 4). Selain itu, tidak adanya kebijakan perumahan yang ketat untuk menyediakan IPAL domestik. 5). Banyaknya pengunjung dan pendatang dari luar Kota Surakarta.

- **Kondisi (*State*)**. Pada Tahun 2020, DLH Kota Surakarta melakukan pemantauan beberapa sumber pencemar air dan juga air sungai, dengan hasil : 1). Pemantauan air limbah Pabrik Tahu/Tempe menunjukkan parameter BOD, COD, dan TSS jauh melampaui baku mutu, 2). Pemantauan air limbah UKM Batik menunjukkan parameter BOD, COD, dan Amonia jauh melampaui baku mutu 3). Pemantauan air limbah KSM Sanimas parameter COD, TSS dan *Total Coliform* melampaui baku mutu. 5). Pemantauan kualitas air sungai menunjukkan bahwa parameter kualitas air sungai di Kota Surakarta masih banyak yang telah melampaui baku mutu. Beberapa parameter yang melampaui baku mutu di beberapa sungai di Kota Surakarta antara lain *Fecal Coliform*, *Total Coliform*, *Phosphate*, BOD, dan COD. Sebagian besar sungai di Kota Surakarta menunjukkan status tercemar.
- **Dampak (*Impact*)** 1). Penurunan atau masih buruknya kualitas air, terutama parameter *Fecal* dan *Total Coliform* berdampak pada kesehatan masyarakat terutama penyakit diare dan kulit 2). Penurunan volume sumber air bersih/air baku. 3). Tingginya penyakit yang berhubungan dengan pencernaan.
- **Respon (*Response*)**: 1). Pelayanan pengelolaan pengolahan limbah domestik rumah tangga melalui sistem *On-Site* dan *Off-Site Sanitation*, 2). Melakukan pemantauan kualitas air sungai, 3). Peningkatan kualitas ODF (*open defecation free*) Atau Stop Buang Air Besar Sembarangan, 4). Upaya pengelolaan lingkungan melalui pengawasan dan penegakan hukum sebagai bentuk ketaatan terhadap Undang – Undang Lingkungan Hidup.

### C. Kualitas Udara

- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah penurunan kualitas udara di Kota Surakarta antara lain: 1). Peningkatan penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Lokasi dan posisi Kota Surakarta terdapat jalan nasional dan provinsi dengan jalur lintas provinsi dan

kabupaten/kota. 3). Kemudahan pembelian kendaraan bermotor. 4). Belum optimalnya strategi dan kebijakan pemerintah terkait transportasi umum. 5). Peningkatan usaha, salah satu usaha transportasi yang saat ini sangat populer adalah adanya Ojek Online (OJOL) berkontribusi terhadap peningkatan kendaraan bermotor.

- **Tekanan (*Pressure*)**. Tekanan (*pressure*) terhadap masalah pencemaran udara di Kota Surakarta secara umum dipengaruhi oleh:
  - 1). Peningkatan volume kendaraan bermotor yang berada dan melintasi Kota Surakarta.
  - 2) Penurunan jumlah vegetasi akibat perubahan tata guna lahan dan penertiban/pembangunan. Penurunan vegetasi ini dapat menyebabkan berkurangnya penyerap polutan udara.
- **Kondisi (*State*)**. Pengawasan dan monitoring dilakukan pada kawasan padat transportasi (*Roadside*), industri/agro industri, kawasan pemukiman dan kawasan perkantoran/komersial di 14 titik lokasi sampling yang tersebar di 5 kecamatan. Hasil pemantauan menunjukkan:
  - 1) Konsentrasi SO<sub>2</sub> tertinggi terletak di kawasan yang padat Industri/Agro Industri sedangkan terendah terletak di kawasan permukiman. Konsentrasi SO<sub>2</sub> di seluruh lokasi pemantauan masih memenuhi Baku mutu,
  - 2). Konsentrasi NO<sub>2</sub> di seluruh lokasi pemantauan masih memenuhi Baku mutu. Berdasarkan hasil pemantauan menunjukkan konsentrasi NO<sub>2</sub> tertinggi terletak di kawasan yang padat Industri/Agro Industri sedangkan terendah terletak di kawasan permukiman.
  - 3). Indeks Kualitas Udara (IKU) menurun.
- **Dampak (*Impact*)** :
  - 1). Peningkatan suhu rata – rata udara,
  - 2). Dampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Terlalu banyak menghirup gas polutan udara seperti CO, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub>, TSP, Pb akan menyebabkan infeksi saluran pernafasan dan pusing.
- **Respon (*Response*)** :
  - 1). Pemantauan kualitas udara ambien maupun inventarisasi emisi.
  - 2). Pengawasan dan uji kualitas udara

pada berbagai aktivitas. 3). Penyediaan transportasi massal yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas maupun jangkauan layanan. 4). Melakukan penghijauan dan penambahan RTH di beberapa lokasi di Kota Surakarta antara lain di bantaran Sungai Bengawan solo, alun-alun, hutan kota, ring road, dan lain-lain. 5). Pembangunan koneksi intermoda untuk memudahkan akses angkutan massal seperti penyediaan halte dan jalur BST melintasi bandara dan stasiun. 6). Pembangunan pedestrian yang nyaman. 7). Pembangunan *Flyover* di ruas Manahan dan di ruas Purwosari agar tidak terjadi kemacetan karena lewatnya kereta api. 8). Rilis regulasi penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 9). Upaya penambahan ruang terbuka hijau (RTH).

#### **D. Resiko Bencana**

- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah resiko bencana di Kota Surakarta antara lain: 1). Lokasi Kota Surakarta yang berada di cekungan yang berpotensi bencana banjir genangan maupun luapan, 2). Kepadatan populasi yang ironisnya berbanding terbalik dengan kondisi persepsi lingkungan. Persepsi tersebut didorong oleh budaya dan kebutuhan sehingga muncul kecenderungan mengabaikan lingkungan, 3). Bencana amblesan tanah akibat eksploitasi pengambilan air tanah, 4). Adanya faktor kemiskinan mendorong sebagian masyarakat tinggal di bantaran sungai.
- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Faktor alam, perubahan iklim yang mengakibatkan perubahan musim dan intensitas hujan sehingga berdampak pada kapasitas sarana pengendali dampaknya. 2). Faktor manusia (*antropogenik*) dan peningkatan jumlah penduduk.
- **Kondisi (*State*):** Pada Tahun 2020 tidak dijumpai adanya bencana banjir, hal ini dikarenakan pemerintah Kota Surakarta telah melakukan perbaikan-perbaikan secara berkelanjutan (*Continuous Improvement*) akan adanya bencana banjir, baik banjir genangan maupun luapan.

- **Dampak (*Impact*):** Pada Tahun 2020 tidak terdapat laporan adanya korban jiwa maupun kerugian materiil akibat bencana. Akan tetapi, walaupun tidak menimbulkan korban jiwa dengan adanya bencana dapat mengakibatkan terganggunya beberapa aktifitas kegiatan masyarakat diantaranya: pendidikan, perkantoran, perdagangan sosial dan lainya.
- **Respon (*Response*):** 1) Pemerintah Kota Surakarta telah merilis Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana untuk memperkuat upaya penanggulangan bencana daerah. 2). Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan kawasan rawan banjir luapan khususnya pada bantaran Sungai Bengawan Solo yang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, khususnya pada bantaran Sungai Bengawan Solo dan sekitarnya. 3). Pembentukan Satgas Covid-19 dalam upaya menangani Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi dari Tahun 2019 hingga saat ini. 4).Pemerintah telah berinisiatif menambah kawasan resapan air dengan biopori, sumur resapan, normalisasi bantaran sungai, dan normalisasi ruang milik jalan dari bangunan/kios menjadi area resapan. 5). Pembangunan pintu air di kali Pepe sebagai penahan banjir. 6). Pemerintah mulai merestorasi fasilitas drainase Kota Surakarta dan memperbaiki secara fisik kondisi beberapa sungai utama. 6). Penataan Parepet Sungai, penataan kawasan kumuh Semanggi dan rumah deret.7). Pemetaan Kerentanan Bencana.

## **E. Masalah Perkotaan ( Sampah dan Kemacetan Lalu Lintas)**

### **E. 1. Sampah**

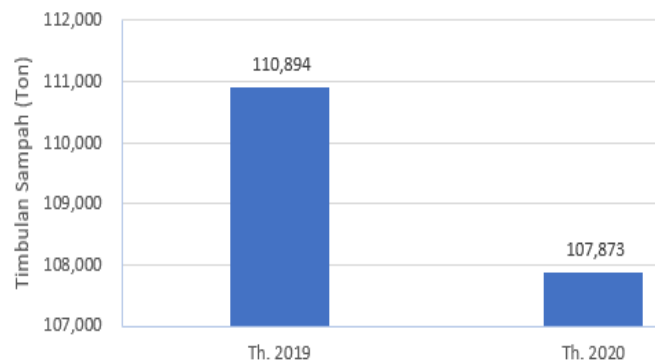
- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah sampah di Kota Surakarta antara lain: 1). Pertumbuhan jumlah penduduk dan perilaku masyarakat. 2). Kebijakan pemerintah Kota Surakarta menjadikan salah satu kota pusat MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*) mengakibatkan banyak pendatang dan pengunjung. 3). Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang

terkenal akan kulinernya dengan pola hidup konsumtif yang cukup tinggi. 4). Pola *New Normal* akibat Pandemi Covid-19 mengakibatkan pemakaian *masker*, *hand sanitiser* dan sabun serta air yang lebih banyak dibandingkan waktu sebelumnya.

- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Peningkatan jumlah penduduk dan pengunjung/wisatawan di Kota Surakarta dengan segala aktifitasnya menyebabkan peningkatan jumlah timbulan sampah. 2). Belum optimalnya pengelolaan sampah baik dari sumbernya maupun di TPS menyebabkan peningkatan sampah secara terus – menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Selain itu, banyaknya PKL juga memberikan sumbangan terhadap timbulan sampah di Kota Surakarta.

- **Kondisi (*State*):**

1). Timbulan sampah rumah tangga, sampah jalan raya, sampah pasar dan pertokoan, dan sampah umum.



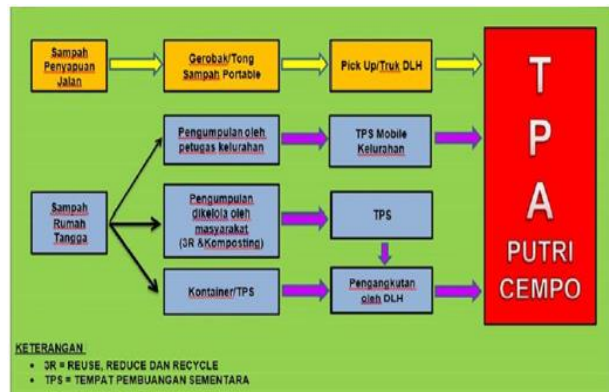
Keseluruhan pengelolaan sampah padat di Kota Surakarta terpusat pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo. Pengolahan sampah pada TPA Putri Cempo dilakukan dengan metode *open dumping* dan sudah *overload*. 2). Jumlah sampah per tahun di Kota Surakarta seperti yang terlihat pada gambar disamping. berdasarkan data timbulan sampah dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,23%. 3). Saat ini Kota Surakarta hanya menyisakan 2 TPS saja dari rencana meniadakan TPS di seluruh Kota Surakarta.

- **Dampak (*Impact*):** Menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, keindahan lingkungan dan potensi terjadinya banjir akibat pembuangan sampah ke drainase/sungai, ledakan gas metan atau

kebakaran, pencemaran udara akibat pembakaran dan timbulnya bau tidak sedap.

• **Respon (Response):**

1). Sosialisasi persampahan dan membuat skema pengelolaan sampah oleh DLH; 2). Penyediaan sarana dan prasarana

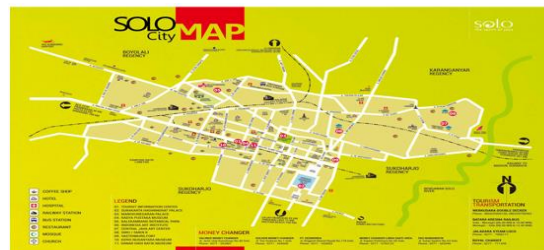


persampahan; 3). Pelaksanaan 3R sampah melalui Bank sampah, 4). Sekolah Adiwiyata, 5). Penghilangan TPS menjadi RTH atau taman; 6). Pelayanan persampahan berbasis komunal; 9). Pembinaan dan pengembangan TPA Putri Cempo untuk mendukung pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah).



**E.2. Kemacetan Lalu Lintas**

• **Faktor Pendorong (Driving Force)** terhadap masalah kemacetan di Kota Surakarta antara lain: 1). Laju pertumbuhan penduduk dan perilaku masyarakat 2). Peningkatan pendapatan masyarakat. 3). Kemudahan pembelian kendaraan bermotor. 4). Belum optimalnya strategi dan kebijakan pemerintah



terangan : \*Stasiun di Kota Surakarta  
 1. Stasiun Purwosari                      3. Stasiun Jebres  
 2. Stasiun Balapan                        4. Stasiun Solo Kota  
 \*Persimpangan jalan dan rel kereta api yang sering mengalami kemacetan  
 A. Perlintasan rel Gilingan (Balapan)  
 B. Perlintasan rel Jebres                  C. Perlintasan rel Pasar Nongko  
 D. Perlintasan rel Palang Joglo



terkait transportasi umum. 5). Lokasi dan posisi Kota Surakarta di jalur lintas Pulau Jawa yang ramai.

- **Tekanan (*Pressure*)** : Peningkatan jumlah kendaraan bermotor baik mobil, motor, truk baik umum maupun pribadi menyebabkan naiknya tingkat kemacetan. Selain itu dipicu juga banyaknya kendaraan yang masuk dan keluar di Kota Surakarta dari luar daerah. Adanya penyalahgunaan ruang milik jalan dan parkir liar dipinggir jalan memperparah kemacetan lalu lintas terutama untuk jalan yang sempit.
- **Kondisi (*State*)**. 1). Kemacetan Kota Surakarta masih bersifat temporary pada waktu tertentu dengan 19 lokasi berpotensi kemacetan, 2). Kondisi jalan raya Kota Surakarta sudah tidak bisa bertambah lagi, selain itu juga terdapat 4 (empat) jalan raya yang melalui persimpangan palang pintu kereta, sehingga arus lalu lintas menjadi terhambat karena adanya kereta yang melintas.
- **Dampak (*Impact*)**: Adanya kemacetan akan menyebabkan peningkatan emisi gas polutan udara dari kendaraan bermotor dan menyebabkan peningkatan suhu udara.
- **Respon (*Response*)**. Upaya untuk meminimalisir atau menanggulangi masalah kemacetan di Kota Surakarta yaitu : Sudah terbangunnya *Flyover* Manahan dan *Flyover* Purwosari, rekayasa lalu lintas misalnya jalan satu arah; jalur *Contraflow*, perbaikan kualitas jalan dan pelebaran jalan, normalisasi ruang milik jalan dari bangunan dan kios, Pemerintah Kota Surakarta telah menyediakan sarana transportasi publik yang mudah, murah dan nyaman yaitu Bus Batik Solo Trans (BST), Pemerintah Kota Surakarta juga menerapkan sanksi gembok roda dan denda tegas bagi para pengguna mobil yang parkir sembarangan dan bukan pada tempatnya.

## F. Tata Kelola

- **Faktor Pendorong (*Driving Force*)** terhadap masalah tata kelola lingkungan hidup di kota Surakarta antara lain: 1). Jumlah personil. 2). Kompetensi personil. 3). Kerjasama instansi. 4). Jumlah anggaran.

- **Tekanan (*Pressure*):** 1). Kurangnya jumlah personil. 2). Kompetensi personil yang tidak sesuai bidangnya. 3). Kerjasama antar instansi yang kurang baik. 4). Rasionalisasi anggaran akibat Pandemi Covid-19.

- **Kondisi (*State*):** Jumlah personil lembaga pengelola lingkungan hidup Kota Surakarta berjumlah 245 orang, pendapatan asli daerah



Tahun 2020 mengalami penurunan 7,44% dibandingkan Tahun 2019, dan jumlah anggaran terkait lingkungan Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 22,23% dari Tahun 2019 dikarenakan rasionalisasi anggaran akibat

pengalihan anggaran yang ada digunakan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

- **Dampak (*Impact*) :** 1). Dampak positif terhadap masalah tata kelola lingkungan hidup adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kota Surakarta, 2). Dampak negatifnya adalah dengan adanya masalah dalam tata kelola lingkungan hidup akan menimbulkan aduan dari masyarakat ke Pemerintah Kota Surakarta maupun DLH Kota Surakarta. Pada Tahun 2020, terdapat 18 pengaduan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.
- **Respon (*Response*),** antara lain: 1). Peningkatan kompetensi personil pengelola lingkungan hidup dengan cara memberikan beasiswa sekolah dan diklat. 2). Penempatan personil sesuai bidang dan kompetensinya. 3). Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup

### 3. ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP

Isu prioritas lingkungan hidup didasari pada permasalahan lingkungan



hidup yang telah, sedang dan/atau akan dialami. Penetapan isu prioritas didasarkan pada analisis DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response*) dan proses partisipatif melalui *Focus Group*

*Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada hari Senin, 05 Mei 2021 dengan melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Perguruan Tinggi dan LSM lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil analisis DPSIR dan FGD, diperoleh urutan isu prioritas:

- 1) Sampah dan Limbah B3,
- 2) Kualitas Air,
- 3) Tata Guna Lahan,
- 4) Kemacetan Lalu lintas

Isu prioritas lingkungan hidup yang telah ditetapkan akan diintegrasikan kedalam analisis *Driving Force-Pressure-State-Impact-Response* (DPSIR), untuk kemudian dilakukan rencana tindak lanjut, serta inisiatif dan inovasi pengelolaan lingkungan hidup melalui program kegiatan dan kebijakan Pemerintah Kota Surakarta.

### 4. INOVASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

**1). Inovasi Daerah** selain pembangunan infrastruktur fisik, juga dilakukan pembagunan non-fisik yaitu melalui peran serta dan



pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. antara lain: Zero TPS, PLTSa, Kegiatan *World Clean Up Day* (WCD) 2020, Solo Menyapu,

Wedangan Uwuh, Pengelolaan Sampah/Limbah B3 Dari Kegiatan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Di Kota Surakarta, Pengelolaan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran Air, Pengolahan Air Limbah Domestik, Prokasih yaitu Kegiatan Resik-Resik Kali Jenes, SANIMAS, Program *Master Meter*, Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Renovasi Bangunan Cagar Budaya, Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan Yang Berkualitas, Peningkatan Persentase Terbangunnya APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), Pembangunan *Flyover* Purwosari Kota Surakarta.

Adanya upaya dan inovasi yang telah dilakukan, Kota Surakarta mendapatkan beberapa penghargaan tingkat nasional pada Tahun 2020 yaitu Peringkat II Hemat Energi dari Pemerintah



Provinsi Jawa Tengah dan sertifikat Proklamasi Utama dari KLHK tahun 2020.

## 5. PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Kota Surakarta merupakan tanggung jawab bersama, kerjasama lintas sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Surakarta, Perguruan Tinggi, Swasta/Perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Lingkungan Hidup Surakarta serta lapisan masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang akurat merupakan salah satu prasyarat utama untuk menghasilkan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang efisien dan efektif. Dokumen IKPLHD Kota Surakarta Tahun 2021 diharapkan dapat mendukung proses dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Surakarta.